

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Indeks Pembangunan Manusia

1. Konsep Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia mempunyai arti yang luas, namun ide dasar dari pembangunan manusia adalah menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. Oleh karena itu manusia harus diposisikan sebagai potensi kekayaan bangsa, sehingga pembangunan manusia diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*Human Development Report*, 1990). Konsep ini berbeda jika dibandingkan dengan konsep konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama kepada pertumbuhan ekonomi bukan pada pembangunan manusia.

Konsep pertumbuhan ekonomi lebih menekankan pada peningkatan produk nasional dari pada memperbaiki kualitas hidup manusia. Konsep pembangunan sumber daya manusia melihat manusia sebagai alat atau input dari proses produksi, bukan sebagai tujuan akhir. Konsep kesejahteraan melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen dari perubahan dalam proses pembangunan. Sedangkan

konsep kebutuhan hanya terfokus pada penyediaan barang dan jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukan memperluas pilihan-pilihan bagi masyarakat diberbagai bidang.

Sedangkan konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi. Sehingga pembangunan manusia yang dimaksudkan adalah suatu proses memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Antara lain yang terpenting adalah pilihan untuk berumur panjang dan sehat, pilihan untuk berilmu, pilihan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Pembangunan manusia merupakan perwujudan pembangunan jangka panjang, yang meletakkan pembangunan disekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Pendekatan pembangunan manusia lebih memfokuskan untuk memperluas pilihan masyarakat untuk hidup secara bebas dan bermartabat. Pembangunan yang dimaksud oleh UNDP bukan hanya sekedar perluasan pendapatan dan kesejahteraan tapi pembangunan manusia yang harus memfokuskan pada manusia. Sedangkan menurut Sen (1989) pemenang nobel dari India mendefinisikan pembangunan manusia sebagai perluasan kebebasan nyata yang dinikmati oleh manusia. Kebebasan bergantung pada faktor sosial ekonomi seperti akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan politik. Pembangunan manusia adalah cara dan tujuan akhir. Sedangkan menurut pakar ekonomi asal Pakistan Haq (1995)

berpendapat pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan yaitu kebebasan berpolitik, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, pilihan untuk pendidikan, bertahan hidup dan sehat, serta menikmati standar hidup yang layak (BPS Jatim, 2016).

Menurut UNDP (1995) dasar pemikiran konsep pembangunan manusia adalah:

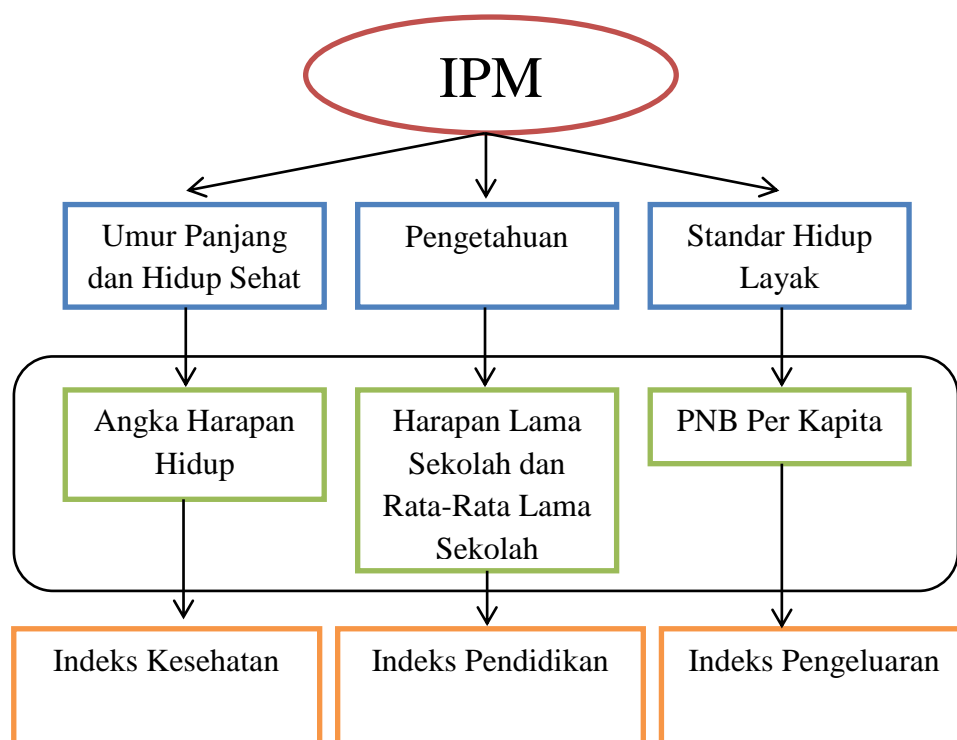
- a. Pembangunan harus mengutamakan manusia sebagai pusat perhatian.
- b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan penduduk. Jadi konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
- c. Pembangunan manusia bukan hanya meningkatkan kemampuan atau kapasitas manusia tapi juga memanfaatkan kemampuan atau kapasitas manusia dengan maksimal.
- d. Pembangunan manusia didukung dengan empat pilar pokok yakni: produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.
- e. Pembangunan manusia sebagai dasar dalam menentukan tujuan pembangunan dan digunakan untuk menganalisis pilihan yang ada untuk mencapainya.

Konsep pembangunan manusia inilah yang akhirnya melahirkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1990 dan sejak saat itu UNDP tidak pernah absen mencatat perkembangan pembangunan manusia diberbagai negara.

Indonesia sendiri mulai menghitung IPM sejak tahun 1996 hingga sekarang. Ada tiga dimensi pembentuk IPM yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standart hidup layak. Pada tahun 2010 UNDP melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM dengan merubah indikator yaitu dengan menggunakan komponen angka harapan hidup saat lahir (AHH), rata-rata lama sekolah (RLS), harapan lama sekolah (HLS), dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita sedangkan BPS dalam menghitung standart hidup layak dengan menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcashing power parity*).

2. Komponen-Komponen IPM

Ada tiga komponen yang digunakan untuk membentuk indeks pembangunan manusia komponen kesehatan atau indeks kesehatan yang dihitung menggunakan indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH), komponen pendidikan atau indeks pendidikan yang dihitung menggunakan indikator rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS), dan komponen standar hidup layak atau indeks pengeluaran yang dihitung menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang didapat dari produk nasional bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcashing power parity*).



Sumber: BPS Jatim, 2016

Gambar 2. 1
Komponen-Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia

Gambar diatas merupakan gambaran tentang pembentukan IPM dengan metode baru. Ada dua alasan yang menjadi dasar perubahan metodologi perhitungan IPM oleh BPS. Pertama, angka melek huruf tidak relevan dalam mengukur pendidikan karena secara utuh tidak menggambarkan kualitas pendidikan sehingga diganti dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf disebagian besar wilayah sudah tinggi sehingga tidak dapat untuk membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Selain itu perhitungan indeks PDB per kapita diganti dengan PNB per kapita karena PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan disuatu wilayah. Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah disuatu dimensi dapat

ditutupi dengan capaian tinggi dari dimensi lain (BPS Jatim, 2016). Komponen-komponen yang digunakan untuk membentuk indeks pembangunan manusia adalah:

a. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan merupakan indeks yang terdiri dari angka harapan hidup saat lahir (AHH), yaitu rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh oleh seseorang selama hidup. Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk perhitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun. Komponen AHH dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{\text{AHH} - \text{AHH}_{\text{min}}}{\text{AHH}_{\text{max}} - \text{AHH}_{\text{min}}} \dots\dots\dots(1)$$

b. Indeks Pendidikan

Ada dua indikator yang digunakan untuk menghitung indeks pendidikan, yaitu harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) dan rata-rata lama (*mean years of schooling*) sekolah. Harapan lama sekolah adalah perhitungan lamanya jumlah waktu sekolah (dalam tahun) yang akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam lamanya pendidikan (dalam tahun)

yang diharapkan dapat ditempuh oleh setiap anak. Sesuai dengan standar dari UNDP harapan lama sekolah memiliki batas maksimum 18 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Komponen HLS dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}} \dots\dots\dots(2)$$

Sedangkan rata-rata lama sekolah adalah perhitungan jumlah tahun yang digunakan penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sesuai dengan standar dari UNDP rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimum 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Komponen RLS dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}} \dots\dots\dots(3)$$

Sedangkan indeks pendidikan diperoleh dari gabungan rata-rata lama sekolah dengan harapan lama sekolah. Komponen Indeks Pendidikan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} \dots\dots\dots(4)$$

c. Indeks Pengeluaran

Indeks pengeluaran digunakan untuk mengukur kualitas hidup layak. Standar hidup layak adalah tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto

(PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcashing power parity*). Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan. Untuk menghitung paritas daya beli (*purcashing power parity*) digunakan rumus sebagai berikut:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m} \dots\dots\dots(5)$$

Keterangan :

PPP_j : paritas daya beli di wilayah j

p_{ij} : harga komoditas i di kabupaten/kota j

p_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan

m : jumlah komoditas

Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 yaitu Talikora-Papua dan daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025. Sedangkan batas maksimum dan minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan IPM adalah sebesar Rp 26.572.352 sementara batas minimumnya adalah Rp 1.007.436. Dalam penghitungan standar hidup layak BPS menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})} \dots\dots\dots(6)$$

Untuk menghitung nilai IPM berdasarkan komponen-komponen diatas menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \dots\dots\dots(7)$$

Keterangan :

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

$I_{\text{kesehatan}}$ = Indeks Kesehatan (dihitung dari AHH)

$I_{\text{pendidikan}}$ = Indeks Pendidikan (dihitung dari HLS dan RLS)

$I_{\text{pengeluaran}}$ = Indeks Pengeluaran (dihitung dari Pengeluaran per Kapita)

Menurut BPS pembangunan manusia dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu:

- 1) Kelompok “Sangat Tinggi” : $IPM \geq 80$
- 2) Kelompok “Tinggi” : $70 \leq IPM < 80$
- 3) Kelompok “Sedang” : $60 \leq IPM < 70$
- 4) Kelompok “Rendah” : $IPM < 60$

Nilai IPM menunjukkan seberapa tingkat keberhasilan pembangunan manusia disuatu wilayah atau negara. IPM dapat digunakan menjadi salah satu tolak ukur apakah suatu negara termasuk negara maju, negara berkembang ataupun negara terbelakang. Selain

itu IPM juga dapat digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat suatu negara.

IPM suatu negara dapat meningkat jika ketiga unsur itu dapat ditingkatkan, karena nilai IPM itu sendiri menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu negara. Menurut Tambunan yang dikutip dalam Kacaribu (2013) dengan kata lain, terdapat korelasi positif antara nilai IPM dengan derajat keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu negara. IPM memang bukanlah ukuran menyeluruh tentang pembangunan manusia, tetapi indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan yang rumit antara penghasilan dan kesejahteraan (Irawan, 2009).

3. Manfaat indeks pembangunan manusia (IPM)

Manfaat indeks pembangunan manusia (IPM) menurut (Soleha, 2016) dapat digunakan untuk beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menyadarkan para pengambil keputusan agar lebih terfokus pada pencapaian manusia, karena IPM diciptakan untuk menjadi hal utama dalam pembangunan sebuah negara, bukan pertumbuhan ekonomi.

- b. Untuk mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan suatu negara. Bagaimana dua negara yang tingkat pendapatan perkapitanya sama dapat memiliki IPM yang berbeda.
 - c. Untuk memperlihatkan perbedaan di antara negara-negara, di antara provinsi-provinsi (atau negara bagian), di antara gender, kesukuan, dan kelompok sosial ekonomi lainnya. Dengan memperlihatkan disparitas atau kesenjangan di antara kelompok-kelompok tersebut, maka akan lahir berbagai debat dan diskusi di berbagai negara untuk mencari sumber masalah dan solusinya.
4. Hubungan Jumlah Penduduk Miskin dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan itu, kemiskinan akan dilihat sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar baik yang berupa makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan oleh BPS dibagi menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum untuk makanan yang disetarakan dengan 2.100 per kapita per hari. Sedangkan garis kemiskinan

non-makanan merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan berdasarkan penyebabnya dan kemiskinan konseptual. Kemiskinan berdasarkan penyebabnya dapat dibagi menjadi dua yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural disebabkan oleh ketidakberdayaan seseorang atau suatu kelompok masyarakat karena sistem atau tatanan sosial yang tidak adil sehingga menyebabkan mereka berada pada posisi yang lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan diri untuk lepas dari jeratan kemiskinan. Kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh suatu tatanan adat dan budaya disuatu daerah yang mengatur seseorang atau kelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya terjebak pada jerat kemiskinan (BPS, 2016).

Sedangkan kemiskinan konseptual sendiri dibagi menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah suatu ukuran minimum bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, baik makanan maupun non makanan, ukuran kemiskinan absolut didasarkan pada garis kemiskinan. Sedangkan kemiskinan relatif yaitu suatu ukuran kemiskinan yang ditentukan secara subjektif oleh masyarakat setempat, sehingga masyarakat yang berada di bawah ukuran tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif (BPS Jatim, 2016).

Menurut Mahmudi yang dikutip oleh Hasan (2016) dalam lingkaran setan kemiskinan (*the vicious circle of poverty*) terdapat tiga poros utama yang menyebabkan seseorang menjadi miskin yaitu rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya pendapatan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Lingkaran setan kemiskinan (*the vicious circle of poverty*) disebabkan oleh berbagai faktor yang saling mempengaruhi sehingga menyebabkan keadaan dimana suatu akan tetap miskin dan sulit bangkit dari kemiskinan karena banyak hambatan untuk meningkatkan pembangunan.

Menurut (Sukirno, 2005) perangkat yang membentuk lingkaran setan kemiskinan ada 3, yaitu:

a. Penawaran dan permintaan modal

Penawaran modal, tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, diakibatkan oleh tingkat produktifitas yang rendah, sehingga menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah. Hal ini yang akan membuat pembentukan modal menjadi rendah dan menyebabkan penawaran modal menjadi rendah, sehingga negara akan kekurangan modal dan menyebabkan tingkat produktifitas akan tetap rendah. Permintaan modal, di negara-negara miskin melakukan penanaman modal rendah karena luas pasar yang tersedia hanya terbatas, hal ini karena produktifitas yang rendah yang disebabkan oleh pembentukan modal dimasa lalu yang rendah.

b. Analisa Nurske

Menurut Nurske yang dikutip dalam Zamharir (2016) peningkatan pembentukan modal tidak hanya terbatas pada lingkaran setan kemiskinan tapi juga karena *International Demonstration Effect* yaitu kecenderungan untuk mencontoh corak konsumsi dikalangan masyarakat yang lebih maju.

c. Meier dan Baldwin

Menurut Meier dan Baldwin yang dikutip dalam Zamharir (2016) Lingkaran setan kemiskinan timbul dari kombinasi hubungan yang saling mempengaruhi dari masyarakat tradisional dan terbelakang dengan kekayaan alam yang belum dikembangkan. Karena masyarakat yang masih terbelakang dan tradisional sehingga membuat sumber daya yang ada tidak dapat diolah, hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah, SDM yang terbatas. Semakin rendah keadaan sosial ekonomi suatu negara, maka semakin terbatas pula sumber daya yang dapat dikelola dan dikembangkan sehingga akan membuat tingkat pembangunan yang rendah. kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan penduduk juga terbatas.

Ketiga penyebab kemiskinan yang bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan karena adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal sehingga akan menyebabkan tingkat produktifitas yang rendah. Produktifitas yang rendah menyebabkan pendapatan juga menjadi rendah, rendahnya pendapatan akan

menyebabkan rendahnya investasi yang menyebabkan keterbelakangan, dan begitu seterusnya.

Kemisikinan dapat terlihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan diartikan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat. Kemiskinan berdampak pada turunnya produktifitas sebagian masyarakat, turunnya produktifitas masyarakat berakibat pada bertambahnya orang miskin baru, dan pada gilirannya akan menurunkan indeks pembangunan manusia. (Basuki & Saptutyningasih, 2016)

Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas (Prawoto, 2005).

Menurut Suradi yang dikutip dalam Suciati (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk miskin akan menekan tingkat

pembangunan manusia sebab penduduk miskin memiliki daya beli yang rendah. Kemiskinan berkaitan erat dan ikut menentukan proses pembangunan yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Paradigma pembangunan yang kini bergeser dari dominasi peran negara kepada peran masyarakat tidak akan dapat diwujudkan apabila jumlah penduduk miskin masih dalam jumlah yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya penduduk miskin lebih banyak menghabiskan waktunya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sebab penduduk miskin tidak tertarik untuk melibatkan diri terhadap kegiatan yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar.

Kemiskinan akan membuat mereka sulit untuk mengkonsumsi makanan bergizi, karena sebagian besar atau seluruh pendapatan yang mereka peroleh akan dihabiskan untuk membeli makanan. Akibatnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan menjadi hilang, dan dengan rendahnya tingkat pengetahuan yang mereka miliki, mereka akan kurang bisa memelihara lingkungan yang sehat. Rendahnya tingkat kesehatan merupakan penyebab kemiskinan karena rendahnya kesehatan akan menyebabkan tingkat produktifitas menjadi rendah. Sehingga dari sudut pandang ekonomi, kesemuanya itu akan menghasilkan sumberdaya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan tingkat produktifitasnya rendah. Hal ini juga akan berimbas pada terbatasnya upah atau pendapatan yang akan mereka peroleh. Rendahnya pendapatan akan menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kemiskinan ini akan menyebabkan

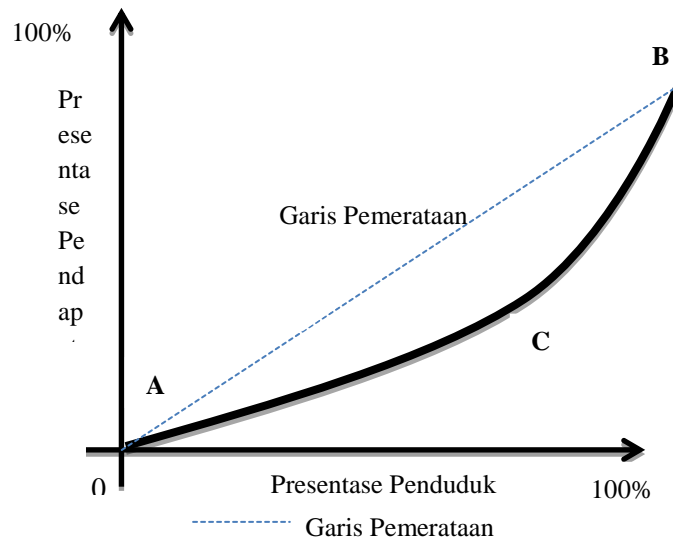
ketidakmampuan untuk memperoleh pendidikan dan biaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan. Hal tersebut terjadi karena pada umumnya penduduk miskin lebih banyak menghabiskan waktu, tenaga dan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kemiskinan akan berdampak pada turunnya produktifitas sebagian masyarakat, turunnya produktifitas masyarakat berakibat pada bertambahnya orang miskin baru, dan pada gilirannya akan menurunkan indeks pembangunan manusia, semakin banyak jumlah penduduk miskin akan menekan terhadap pembangunan manusia karena penduduk miskin mempunyai tingkat kesehatan, pendidikan dan daya beli yang rendah.

5. Hubungan Rasio Gini dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Rasio gini merupakan indikator ketimpangan distribusi pendapatan, ketimpangan distribusi pendapatan ini merupakan salah satu permasalahan bagi negara-negara berkembang di dunia. Distribusi pendapatan perorangan sendiri merupakan ukuran yang paling sering digunakan oleh para ekonom untuk menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga (Todaro dan Smith, 2006). Pada tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang maksimum atau kekayaan hanya dimiliki oleh satu orang saja maka tingkat kemiskinan akan semakin tinggi, sedangkan pada tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang minimum kekayaan dimiliki oleh setiap orang akan identik dan distribusi pendapatan setiap orang akan sama. Tingkat ketimpangan diukur melalui

pendapatan perorangan dengan menggunakan kurva lorenz yang diperkenalkan pertama kali oleh Max Otto Lorenz pada tahun 1905.



Sumber : Todaro dan Smith, 2006

Gambar 2. 2
Kurva Lorenz

Kurva lorenz adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara presentase kumulatif pendapatan yang diterima dalam jangka waktu tertentu dengan presentase kumulatif populasi yang menerima pendapatan yang benar-benar diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Jika semakin jauh jarak antara kurva lorenz dari garis diagonalnya maka semakin tidak merata atau timpang distribusi pendapatannya, sebaliknya jika jarak antara kurva lorenz dari garis diagonalnya maka semakin dekat maka semakin merata distribusi pendapatannya.

Rasio gini digunakan untuk mengetahui tinggi rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan. Perhitungan dasar rasio gini didapatkan dari perhitungan luas kurva lorenz yang menggambarkan

distribusi pendapatan seluruh kelompok pengeluaran. Rasio atau perbandingan antara luas daerah kurva lorenz dengan luas daerah di bawah garis diagonalnya akan menghasilkan nilai rasio gini. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio gini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i+Q_{i-1})}{10000} \dots\dots\dots(8)$$

Keterangan:

P_i : Presentase penduduk pada kelas pengeluaran ke-i

k : Jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk

Q_i : Presentase kumulatif jumlah pengeluaran pada kelas pengeluaran ke-i

Perhitungan tingkat distribusi pendapatan dengan menggunakan indeks rasio gini memiliki rasio anatar 0 sampai 1. Jika indeks rasio gini sama dengan 1 maka terjadi ketimpangan distribusi yang sempurna, maksudnya adalah seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu orang saja. Jika indeks rasio gini sama dengan 0 maka terjadi distribusi pendapatan yang sempurna, maksudnya adalah setiap golongan penduduk mendapatkan pendapatan yang merata atau sama.

Distribusi pendapatan adalah determain yang paling berperan dalam pembangunan manusia pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Menurut (Basuki dan Saptutyarningsih, 2016) ada hubungan negatif dan signifikan antara rasio gini dengan indeks pembangunan. Kenaikan rasio gini berarti telah terjadi peningkatan ketidakmerataan distribusi

pendapatan, hal ini berarti terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dan akhirnya dapat menurunkan indeks pembangunan manusia (Brata, 2002).

6. Hubungan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Upah merupakan salah satu sarana bagi pekerja untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Kebijakan upah minimum merupakan sistem penguapahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara (Sulistiawati, 2012). Kebijakan upah minimum dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Kedua sebagai proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktifitas (Simanjuntak, 2001). Tujuan dari diberlakukannya upah minimum menurut (Sumarsono, 2003) ada 3, yaitu:

- a. Menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu.
- b. Meningkatkan produktifitas pekerja.
- c. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas perusahaan dengan cara produksi yang lebih efisien.

Salah satu komponen dalam IPM adalah indeks pengeluaran yaitu gambaran tentang kemampuan daya beli masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya secara layak. Tentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar layak diperlukan pendapatan, pendapatan atau upah yang diperoleh oleh masyarakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Zamharir (2016) upah minimum regional merupakan komponen dari pendapatan seseorang yang tinggal disuatu daerah, sehingga tingkat upah merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan kesejahteraan masyarakat dari suatu negara. Upah minimum juga merupakan salah satu faktor penentu bagi investor untuk menanamkan modalnya disuatu wilayah, terutama jika investor ingin mendirikan perusahaan atau pabrik yang akan banyak menyerap tenaga kerja. Semakin tinggi upah minimum regional suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat ekonominya (Zamharir, 2016)

Menurut Mankiw (2006) teori efisiensi upah (*efficiency-wage*) dibagi menjadi empat, antara lain sebagai berikut :

- a. Upah yang tinggi akan menyebabkan pekerja lebih produktif

Pengurangan upah akan menurunkan besaran upah yang dikeluarkan perusahaan terhadap pekerja, tetapi hal itu juga akan menurunkan produktifitas pekerja dan memangkas laba perusahaan.

- b. Upah yang tinggi pula dapat menyebabkan perputaran tenaga kerja berkurang.

Dengan membayar upah yang tinggi akan membuat pekerja tetap bertahan, sehingga akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari dan melatih lagi pekerja yang baru.

- c. Kualitas tenaga kerja ditentukan oleh besarnya upah.

Jika perusahaan melakukan pengurangan upah, maka akan membuat pekerja terbaik memilih bekerja di perusahaan lain sehingga menyisakan pekerja yang kurang terdidik.

- d. Upah yang tinggi meningkatkan upaya pekerja.

Jika perusahaan tidak dapat melakukan pengawasan penuh terhadap pekerjanya dan setiap pekerja yang memutuskan sendiri bagaimana mereka akan bekerja keras maka dengan semakin tinggi upah yang diberikan akan membuat pekerja lebih bersemangat bekerja, karena pekerja akan mengalami kerugian jika sampai dipecat. Tingginya upah yang diberikan memotivasi pekerja untuk lebih giat bekerja untuk meningkatkan produktifitasnya.

Inti dari teori efisiensi upah adalah perusahaan akan beroperasi dengan lebih efisien jika perusahaan membayar pekerjanya dengan upah yang tinggi, hal itu membuat perusahaan menganggap mempertahankan upah di atas tingkat keseimbangan penawaran dan permintaan adalah hal yang menguntungkan.

Jika upah minimum meningkat akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, sehingga akan meningkatkan permintaan

masyarakat juga akan naik. Pertambahan pendapatan akan menaikkan pengeluaran konsumsi, tambahan konsumsi dapat berupa makanan, non makanan, pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya akan ada efek pengganda atau pelipat (*Multiplier Effect*), peningkatan ini dapat meningkatkan pembangunan manusia. Pendidikan merupakan salah satu faktor dapat mempengaruhi tingkat upah, karena dengan pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mendapat pendapatan yang lebih tinggi. Sehingga dengan pendidikan akan memberikan kesempatan bagi seseorang untuk dapat memperoleh kesempatan agar dapat meningkatkan standar hidupnya. Sehingga naiknya upah dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Kesimpulannya jika upah yang didapatkan masyarakat bertambah, maka daya beli masyarakat juga akan semakin besar. Masyarakat dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan juga bertambah, masyarakat akan mampu membayar biaya perawatan dan pemeliharaan kesehatannya sehingga produktifitasnya akan meningkat. Masyarakat akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat, dan tentu dengan adanya kenaikan upah akan menaikkan tingkat kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat sehingga akan meningkatkan pembangunan manusia.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu. Beberapa acuan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian Basuki dan Saptutyarningsih (2016) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2008-2015 (Studi Kasus Kab/Kota D I Yogyakarta)”. Menggunakan variabel independen pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, pengeluaran pemerintah untuk fasilitas umum, rasio gini dan jumlah penduduk miskin di 5 kabupaten/kota di DIY dengan jangka waktu 7 tahun (2008-2014). Dengan menggunakan metode data panel diperoleh hasil bahwa variabel pendapatan perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di DIY. Variabel pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan umum berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM di DIY. Variabel rasio gini dan jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan dan negatif terhadap IPM di DIY.
2. Penelitian Prawoto (2011) yang berjudul “ Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia”. Menggunakan variabel independen belanja daerah per kapita, rasio gini, proporsi pengeluaran non-makanan perkapita dan rasio ketergantungan di 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dengan periode waktu 8 tahun (2002-2009). Dengan menggunakan regresi data panel diperoleh hasil bahwa belanja daerah per kapita dan proporsi pengeluaran non-makanan perkapita berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM di Jawa

Tengah. Variabel rasio gini dan rasio ketergantungan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap IPM di Jawa tengah.

3. Penelitian Zamharir (2016) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, PDRB Per Kapita dan Upah Minimum terhadap *Human Development Index*: Studi Kasus 12 Provinsi dengan Kategori *Lower Medium* di Indonesia”. Menggunakan variabel independen pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, PDRB per kapita dan upah minimum di 12 Provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode data panel diperoleh hasil bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap IPM di 12 Provinsi di Indonesia. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita dan upah minimum berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM di 12 Provinsi di Indonesia.
4. Penelitian Soleha (2015) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Indeks Pembangunan Manusia IPM” Studi kasus di Indonesia Tahun 1985-2014. Menggunakan variabel independen pertumbuhan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pertumbuhan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di Indonesia dari tahun 1985 sampai 2014. Dengan menggunakan metode VECM diperoleh hasil bahwa variabel pertumbuhan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM di Indonesia, sedangkan

variabel pertumbuhan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, variabel penanaman modal asing dan variabel penanaman modal dalam negeri berpengaruh signifikan dan negatif terhadap IPM di Indonesia.

5. Penelitian Yusri (2014) yang berjudul “Analisis Determain Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Aceh”. Menggunakan variabel independen pengeluaran rumah tangga, pengeluaran rumah tangga bukan makanan, rasio penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan di Provinsi Aceh dengan periode waktu 5 tahun. Dengan menggunakan metode data panel diperoleh hasil bahwa variabel independen pengeluaran rumah tangga, pengeluaran rumah tangga bukan makanan, rasio penduduk miskin dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Aceh. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Aceh.
6. Penelitian Brata (2002) yang berjudul “Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional di Indonesia”. Menggunakan variabel independen rasio pembentukan modal tetap domestik bruto (RPMTDB), Indeks Gini, rasio migas terhadap PDRB (RMIGAS), variabel boneka konflik provinsi dan rata-rata lama sekolah perempuan (LLSP) terhadap IPM dan PDRB per kapita. Dengan menggunakan metode *two stages least square* (TSLS) diperoleh hasil bahwa variabel PDRB per kapita dan rata-rata lama sekolah perempuan berpengaruh signifikan dan positif terhadap

IPM di Indonesia. Sedangkan variabel rasio pembentukan modal tetap domestik bruto (RPMTDB), Indeks Gini, rasio migas terhadap PDRB (RMIGAS), variabel boneka konflik provinsi tidak berpengaruh terhadap IPM dan PDRB per Kapita di Indonesia. Variabel indeks gini, rasio migas terhadap PDRB(RMIGAS), dan rata-rata lama sekolah perempuan (LLSP) berpengaruh signifikan dan positif terhadap PDRB per kapita di Indonesia.

7. Penelitian Kacaribu (2013) yang berjudul “Analisis Indeks Pembangunan Manusia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi di Provinsi Papua”. Menggunakan variabel independen produk domestik regional bruto (PDRB), pengeluaran pemerintah menurut fungsi pendidikan, rasio jumlah penduduk terhadap jumlah dokter, rasio jumlah penduduk terhadap jumlah bidan, rasio jumlah penduduk terhadap jumlah perawat, rasio kemiskinan terhadap jumlah penduduk, rasio murid SD terhadap guru, rasio murid SMP terhadap guru dan rasio murid SMA terhadap guru di 29 kabupaten/kota yang ada di provinsi Papua dengan periode waktu 3 tahun. Dengan menggunakan metode data panel dengan pendekatan *fixed effect Model* diperoleh hasil bahwa variabel PDRB, pengeluaran pemerintah menurut fungsi pendidikan, rasio jumlah penduduk terhadap jumlah dokter, rasio jumlah penduduk terhadap jumlah bidan, rasio jumlah penduduk terhadap jumlah perawat, rasio kemiskinan terhadap jumlah penduduk dan rasio murid SMA terhadap guru berpengaruh signifikan terhadap IPM di Papua. Sedangkan variabel rasio murid SD terhadap guru

dan rasio murid SMP terhadap guru tidak berpengaruh terhadap IPM di provinsi Papua.

8. Penelitian Rustariyuni (2014) yang berjudul “Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2004-2012. Menggunakan variabel gini ratio, pengeluaran non makanan per kapita, belanja daerah dan laju pertumbuhan ekonomi di 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dengan periode waktu 9 tahun. Dengan menggunakan metode data panel diperoleh hasil bahwa variabel gini ratio, variabel pengeluaran non makanan per kapita, variabel belanja daerah dan variabel laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2004-2012.

Beberapa hasil penelitian terdahulu diatas yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian disajikan dalam sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Analisis
1.	Basuki dan Saptutyaningasih (2016) “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2008-2015 (Studi Kasus Kab/Kota DI Yogyakarta)”.	Variabel Dependen: 1. IPM Variabel Independen: 1. Pendapatan Perkapita 2. Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan 3. Pengeluaran Pemerintah Untuk Fasilitas Umum, 4. Rasio Gini 5. Jumlah penduduk miskin	Regresi Data Panel	1. Variabel pendapatan perkapita tidak berpengaruh signifikan 2. Variabel pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh signifikan dan positif. 3. Variabel pengeluaran pemerintah untuk umum berpengaruh signifikan dan positif 4. Variabel rasio gini berpengaruh signifikan dan negatif. 5. Variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan dan negatif
2.	Prawoto (2011) “Analisis Faktor-Faktor yang berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia”.	Variabel Dependen: 1. IPM Variabel Independen: 1. Belanja Daerah Perkapita 2. Rasio Gini 3. Proporsi pengeluaran non-makanan perkapita 4. Rasio Ketergantungan	Regresi Data Panel	1. Variabel Belanja daerah per kapita berpengaruh signifikan dan positif. 2. Variabel Proporsi pengeluaran non-makanan perkapita berpengaruh signifikan dan positif. 3. Variabel rasio gini berpengaruh signifikan dan negatif 4. Variabel rasio ketergantungan berpengaruh signifikan dan negatif.

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Analisis
3.	Zamharir (2016) <i>“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, PDRB Per Kapita dan Upah Minimum terhadap Human Development Index: Studi Kasus 12 Provinsi dengan Kategori Lower Medium di Indonesia”</i> .	Variabel Dependen: 1. HDI Variabel independen: 1. PE 2. Kemiskinan 3. PDRB per Kapita 4. UMR	Regresi Data Panel	1. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif 2. Variabel kemiskinan berpengaruh negatif tapi tidak signifikan 3. Variabel PDRB per kapita berpengaruh signifikan dan positif 4. Variabel upah minimum berpengaruh signifikan dan positif
4.	Soleha (2015) <i>“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) terhadap Indeks Pembangunan Manusia IPM”</i> Studi kasus di Indonesia Tahun 1985-2014.	Variabel Dependen: 1. IPM Variabel independen: 1. Pertumbuhan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan 2. Pertumbuhan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan 3. PMA 4. PMDN	VECM	1. Variabel pertumbuhan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan dan positif 2. Variabel pertumbuhan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan dan negatif 3. Variabel penanaman modal asing berpengaruh signifikan dan negatif 4. Variabel penanaman modal dalam negeri berpengaruh signifikan dan negatif

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Analisis
5.	Yusri (2014) "Analisis Determain Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Aceh"	Variabel Dependen: 1. IPM Variabel independen: 1. Pengeluaran pemerintah kesehatan 2. Pengeluaran pemerintah pendidikan 3. Pengeluaran rumah tangga 4. Pengeluaran rumah tangga non makanan 5. Penduduk miskin	Regresi Data Panel	1. Variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan 2. Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh signifikan 3. Variabel pengeluaran rumah tangga berpengaruh signifikan 4. Variabel pengeluaran rumah tangga bukan makanan berpengaruh signifikan 5. Variabel rasio penduduk miskin berpengaruh signifikan
6.	Brata (2002) "Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional di Indonesia"	Variabel Dependen: 1. IPM 2. PDRB per kapita Variabel independen: 1. RPMTDB 2. Indeks Gini 3. DK 4. LLSP	Two stages least square (TSLS)	1. Variabel RPMTDB berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM dan PDRB per kapita 2. Variabel Indeks Gini berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM dan PDRB per kapita 3. Variabel DK berpengaruh signifikan terhadap IPM dan tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita 4. Variabel LLSP tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM dan PDRB per kapita 5. Variabel PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap IPM 6. Variabel IPM berpengaruh signifikan dan positif terhadap PDRB per kapita

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Analisis
7.	Kacaribu (2013) <i>“Analisis Indeks Pembangunan Manusia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi di Provinsi Papua”</i> .	Variabel Dependen: 1. IPM Variabel independen: 1. PDRB 2. Pengeluaran pemerintah menurut fungsi pendidikan 3. Rasio jumlah penduduk terhadap dokter 4. Rasio jumlah penduduk terhadap bidan 5. Rasio jumlah penduduk terhadap perawat 6. Rasio kemiskinan terhadap jumlah penduduk 7. Rasio murid SD terhadap guru 8. Rasio murid SMP terhadap guru 9. Rasio murid SMA terhadap guru	Regresi Data Panel	1. Variabel (PDRB) berpengaruh signifikan 2. Variabel pengeluaran pemerintah menurut fungsi pendidikan berpengaruh signifikan 3. Variabel rasio jumlah penduduk terhadap jumlah dokter berpengaruh signifikan 4. Variabel rasio jumlah penduduk terhadap jumlah bidan berpengaruh signifikan 5. Variabel rasio jumlah penduduk terhadap jumlah perawat berpengaruh signifikan 6. Variabel rasio kemiskinan terhadap jumlah penduduk berpengaruh signifikan 7. Variabel rasio murid SMA terhadap guru berpengaruh signifikan 8. Variabel rasio murid SD terhadap guru tidak berpengaruh 9. Variabel rasio murid SMP terhadap guru tidak berpengaruh

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Analisis
8.	Rustariyuni (2014) <i>“Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan PerKapita, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2004-2012”</i> .	Variabel Dependen: 1. IPM Variabel independen: 1. Gini Rasio 2. Pengeluaran Non Makanan 3. Belanja Modal 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Regresi Data Panel	1. Variabel gini rasio berpengaruh signifikan dan positif 2. Variabel pengeluaran non makanan berpengaruh signifikan dan positif 3. Variabel belanja modal berpengaruh signifikan dan positif 4. Variabel laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif

C. Model Penelitian

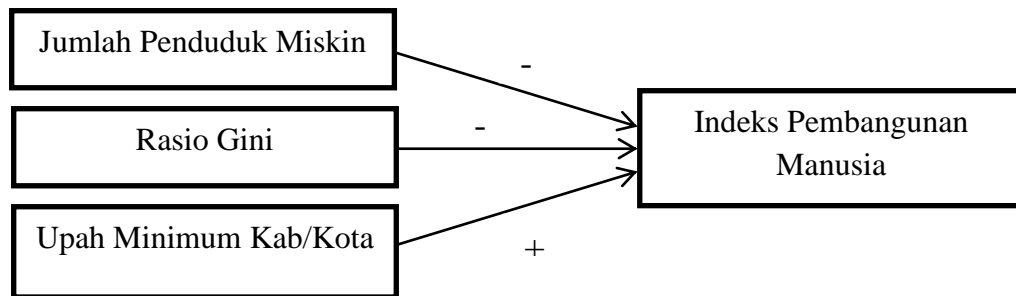
Peningkatan jumlah penduduk miskin akan menyebabkan daya beli masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan lain, misalnya kesehatan, pendidikan juga tidak dapat terpenuhi. Dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan dan juga pendapatan akan menyebabkan kesejahteraan mereka menurun. Kemiskinan dapat memberikan dampak buruk bagi pembangunan manusia, karena ketiga indikator tersebut merupakan komponen pembentuk indeks pembangunan manusia.

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu permasalahan dalam ekonomi, karena ketimpangan penghasilan dapat berkaitan dengan naiknya jumlah penduduk miskin. Penghasilan penduduk

berpendapatan tinggi semakin meningkat dan penghasilan penduduk berpendapatan rendah semakin turun. Dengan rendahnya pendapatan akan menurunkan daya beli masyarakat dan menambah jumlah penduduk miskin, sehingga kesejahteraan akan menurun dan pembangunan manusia akan terkena dampak negatif dari ketimpangan distribusi pendapatan.

Upah merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan, dengan adanya peraturan upah minimum dari pemerintah akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kenaikan upah minimum akan menyebabkan daya beli masyarakat akan meningkat dan standar hidup layak juga akan meningkat, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan lain seperti kesehatan dan pendidikan juga akan terpenuhi. Sehingga kesejahteraan masyarakat akan naik dan tentunya akan mendorong pembangunan manusia.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menggunakan tiga variabel yaitu: jumlah penduduk miskin (JPM), rasio gini (GINI) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebagai faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Eks Karesidenan Madiun. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menggambarkan variabel-variabel yang akan diteliti dalam kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 2. 3
Kerangka Berfikir

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau simpulan yang diambil berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Perubahan indikator pada variabel jumlah penduduk miskin diduga berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten/kota Eks Karesidenan Madiun.
2. Perubahan indikator pada variabel rasio gini diduga berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten/kota Eks Karesidenan Madiun.
3. Perubahan indikator pada variabel upah minimum kabupaten/kota diduga berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten/kota Eks Karesidenan Madiun.